



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Samarinda

Jl. Sentosa Dalam No. 01 Kelurahan  
Sungai Pinang Dalam Kecamatan  
Sungai Pinang Kota Samarinda





WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
  10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II  
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V Penutup.

**Pasal 4**

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
  - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
  - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
  - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
  - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
  - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
  - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
  - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
  - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
  - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
  - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
  - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
  - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
  - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
  - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
  - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
  - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
  - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
  - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
  - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
  - bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
  - cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
  - dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
  - ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
  - gg. Kecamatan Palaran;
  - hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
  - ii. Kecamatan Samarinda Kota;
  - jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
  - kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
  - ll. Kecamatan Samarinda Utara;
  - mm. Kecamatan Sambutan; dan
  - nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
  - Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

BAB IV  
PERUBAHAN  
Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 500

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021 – 2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 nanti juga akan dilaksanakan sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, Juni 2024

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Landasan Hukum.....	13
1.3 Maksud dan Tujuan .....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2024</b>	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBD Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA BPBD Kota Samarinda.....	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	47
2.4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	65
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	67
3.3 Program dan Kegiatan .....	69
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah ***"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban"***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023 adalah :

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana ;

- k. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana ;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penggulangan Bencana ;
- t. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- u. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
  - å. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  - ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  - ö. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor : 0199/M/PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK/07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
  - aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
- ff. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;
- gg. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- hh. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- ii. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- jj. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
- kk. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
- ll. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
- mm. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- nn. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
- oo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2026;
- pp. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- qq. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 24 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- rr. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021 - 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

#### **Tujuan Internal:**

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kota Samarinda dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kota, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.

4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan.

**Tujuan External:**

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kota Samarinda yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kota Samarinda memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian**

**Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD**, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BPBD Kota Samarinda Tahun 2024.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BPBD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD**, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Pada Bagian ini menjelaskan uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja beserta target capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 beserta pagu indikatif anggaran nya di tahun 2024 yang akan datang mengenai program dan kegiatan nya.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2024**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD KOTA SAMARINDA**

Rencana Kerja BPBD Kota Samarinda adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Samarinda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda berupaya memenuhi beberapa sasaran kinerja yang sudah direncanakan di dalam Renstra Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana
2. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatnya pelayanan pasca bencana

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) BPBD Kota Samarinda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kota Samarinda selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

**Tabel TC-29**

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Triwulan 2  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 2			Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian		
						Sampai Dengan RPJMD Kota berjalan yg dievaluasi (2024)		RKPD Kota yang RKPD Kota Tahun Lalu -2023					RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Realisasi Anggaran		
K		Rp		K		Rp		Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.00.00.00. 04.0000																			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda																			
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			16,988,853,562		19,189,905,588			2,303,248,547		4,076,458,343		21,065,311,905	5.91	21.24
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			7,347,853,804		11,029,124,590			705,829,132		921,418,608		8,269,272,412	0	8.35
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3			Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi			47.96 %					0				0	
Faktorisasi Program Triwulan 2 :																			
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3			Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan			49.82 %					0				0	
Faktorisasi Program Triwulan 2 :																			
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3			Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi			29.63 %					0				0	
Faktorisasi Program Triwulan 2 :																			

1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		181,598,951		570,000,000			0	0	181,598,951	0	0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 1		Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana		3 Jenis				0	0			0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			0	270,000,000			0	0	0	0	0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 1		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 Dokumen				0				0	
Faktor Pendukung T2 :																	
Faktor Penghambat T2 :																	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 1	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		0	300,000,000			0	0	0	0	0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 1	4	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		300 Orang				0				0	
Faktor Pendukung T2 :																	
Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	0		
Predikat Kinerja														SR	SR		
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 2	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		4,081,450,263		5,838,124,650		328,949,661		533,261,637	4,614,711,900	0	9.13
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 2	6	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana		4 Jenis					0			0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 2	6	Pengukuran Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		5	84,974,900		1,000,000,000		0	0	84,974,900	0	0
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 2	6	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		5 Kawasan					0			0	
Faktor Pendukung T2 :																	

					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		6	21,032,750		250,000,000			13580500		13,580,500		34,613,250	0	5.43
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	8		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			11 Orang				0					0	
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi		1	196,835,281		250,000,000			0		0	196,835,281		0	0
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	9		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi			2 Dokumen			0					0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 0	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		99	1,042,306,249		831,474,650			20530000		20,530,000	1,062,836,249		0	2.47
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 0		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			500 Orang			0					0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		0	0	250,000,000			0		0	0	0	0	0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 1		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi			2 Dokumen			0					0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		2	47,782,400		230,000,000			0		0	47,782,400		0	0
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			59 Keluarga			0					0		

					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			0		1,200,000,000			41947759		41,947,759		41,947,759	0	3.5
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 3	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			12 Dokumen					0				0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			0		250,000,000			17162954		27,379,930		27,379,930	0	10.95
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 4	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen						0				0	
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			0		416,650,000			138659124		138,659,124		138,659,124	0	33.28
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 5	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			10 Unit						0				0	
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			0		350,000,000			0		0		0	0	0
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 6	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			100 Orang						0				0	
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 2	1 7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			0		810,000,000			97069324		291,164,324		291,164,324	0	35.95

1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 2	1 7		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen					0				0	
						Faktor Pendukung T2 :														
						Faktor Penghambat T2 :														
						Rata-rata capaian kinerja (%)													0	9.13
						Predikat Kinerja												SR	SR	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1,952,938,556		2,645,000,000			142,140,425		149,882,925		2,102,821,481	0	5.67
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	1		Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			5 Jenis					0				0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		1	15,274,000		120,000,000			0		0	15,274,000	0	0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	1		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			1 Laporan					0				0	
						Faktor Pendukung T2 :														
						Faktor Penghambat T2 :														
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		1	36,770,000		120,000,000			12900000		12,900,000		49,670,000	0	10.75
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	2		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			1 Dokumen					0				0	
						Faktor Pendukung T2 :														
						Faktor Penghambat T2 :														
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		190 0	1,570,605,416		1,200,000,000			37943825		42,318,825		1,612,924,241	0	3.53
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 · 0 3	3		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			3000 Orang					0				0	
						Faktor Pendukung T2 :														
						Faktor Penghambat T2 :														

1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 3	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			0		1,000,000,000			63546600		65,314,100		65,314,100	0	6.53										
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 3	9		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1500 Orang					0					0										
					Faktor Pendukung T2 :																									
					Faktor Penghambat T2 :																									
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 3	1 0	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			0		110,000,000			27750000		29,350,000		29,350,000	0	26.68										
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 3	1 0		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			1 Dokumen					0					0										
					Faktor Pendukung T2 :																									
					Faktor Penghambat T2 :																									
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 3	1 1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			0		95,000,000			0		0		0		0										
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 3	1 1		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			1 Laporan					0					0										
					Faktor Pendukung T2 :																									
					Faktor Penghambat T2 :																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	5.67										
Predikat Kinerja																			SR	SR										
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1,131,866,034		1,975,999,940			234,739,046		238,274,046		1,370,140,080	0	12.06										
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4			Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			5 Jenis					0					0										
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			2	65,533,142		200,000,000		6095000		6,095,000		71,628,142	0	3.05										
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	1		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			2 Dokumen					0					0										

					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	2	Penguanan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		2	38,359,000		200,000,000			0		0	38,359,000	0	0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	2		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			1 Dokumen				0				0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		1	44,394,386		150,000,000			72000		720	45,114,386	0	0.48	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	3		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			3 Dokumen				0				0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1	97,357,050		250,000,000			0		0	97,357,050	0	0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	4		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			1 Dokumen				0				0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			0		200,000,000			0		0	0	0	0	
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	5		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			1 Laporan				0				0		
					Faktor Pendukung T2 :															
					Faktor Penghambat T2 :															
1.05.0.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	1 0	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			0		975,999,940			227924046		231,459,046	231,459,046	0	23.72	

1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	3	2 0 4	1 0	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			2 Kegiatan					0				0	
Faktor Pendukung T2 :																			
Faktor Penghambat T2 :																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															0	12.06			
Predikat Kinerja															SR	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3)															0	8.35			
Predikat Kinerja															SR	SR			
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,640,999,758		8,160,780,998		1,597,419,415		3,155,039,735		12,796,039,493	90.67	38.66
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1			Nilai IKM			75 Nilai		0		68			90.67			
Faktorisasi Program Triwulan 2 :																			
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81,715,970		200,000,000		3,161,500		3,161,500		84,877,470	1.54	1.58
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1		Nilai AKIP			65 Nilai						1			1.54	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	44,406,470		100,000,000		3161500		3,161,500		47,567,970	20	3.16
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen						1			20	
Faktor Pendukung T2 :																			
Faktor Penghambat T2 :																			
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	25,704,200		50,000,000		0		0		25,704,200	0	0
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan					0				0	
Faktor Pendukung T2 :																			

				Faktor Penghambat T2 :																	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	11,605,300		50,000,000			0		0	11,605,300	0	0		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 1	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan				0				0			
				Faktor Pendukung T2 :																	
				Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																6.67	1.58				
Predikat Kinerja																SR	SR				
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,535,496,020		6,290,341,000			1,550,903,514		3,076,341,140	8,611,837,160	25	48.91		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2			Jumlah Laporan			12 Laporan					3			25			
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		36	4,877,596,790		5,645,299,000			1355023514		2,716,661,140	7,594,257,930	25	48.12		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bulan					9			25			
				Faktor Pendukung T2 :																	
				Faktor Penghambat T2 :																	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		18	614,415,508		595,042,000			17728000		341,080,000	955,495,508	25	57.32		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen					3			25			
				Faktor Pendukung T2 :																	
				Faktor Penghambat T2 :																	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	43,483,722		50,000,000			18600000		18,600,000	62,083,722	20	37.2		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 2	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan					1			20			

					Faktor Pendukung T2 :																					
					Faktor Penghambat T2 :																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		23.33	48.91							
Predikat Kinerja																		SR	SR							
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,050,087,017		748,437,050			28,706,675			32,816,675		2,082,903,692		0	4.39					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6		Laporan Penyediaan Administrasi Umum			4 Laporan						0					0						
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5	9,240,000		9,990,670			0		0	9,240,000		0	0						
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket						0					0						
					Faktor Pendukung T2 :																					
					Faktor Penghambat T2 :																					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	1,697,282,400		375,225,410				0		0	1,697,282,400		0	0					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16 Paket						0					0						
					Faktor Pendukung T2 :																					
					Faktor Penghambat T2 :																					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		18	39,106,000		42,517,500				0		0	39,106,000		0	0					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			27 Paket						0					0						
					Faktor Pendukung T2 :																					
					Faktor Penghambat T2 :																					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	40,703,880		38,998,470				9393450		9,393,450		50,097,330		0	24.09				
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket						0					0						

				0 6															
					Faktor Pendukung T2 :														
					Faktor Penghambat T2 :														
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu		18	11,724,250		12,000,000			0		0	11,724,250	0	0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22 Laporan				0				0		
					Faktor Pendukung T2 :														
					Faktor Penghambat T2 :														
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	252,030,487		269,705,000			19313225		23,423,225	275,453,712	8.33	8.69	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 6	9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan				1				8.33		
					Faktor Pendukung T2 :														
					Faktor Penghambat T2 :														
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																		<b>1.39</b>	<b>4.39</b>
<b>Predikat Kinerja</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,292,475,828		265,650,000			0		0	1,292,475,828	0	0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 7		Laporan Rencana Kebutuhan Barang			1 Laporan				0				0		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 7	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	931,475,828		243,350,000			0		0	931,475,828	0	0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 7	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit				0				0		
					Faktor Pendukung T2 :														
					Faktor Penghambat T2 :														
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 7	5 Pengadaan Mebel				0	22,300,000			0		0	0	0	0	

1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 7	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			13 Unit					0				0	
							Faktor Pendukung T2 :													
							Faktor Penghambat T2 :													
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																	0	0		
<b>Predikat Kinerja</b>																			SR	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117,642,363		136,478,948			14,647,726		42,720,420	160,362,783	2.21	31.3	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 8			Laporan Penyediaan Jasa			136 Laporan					3			2.21		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36	97,642,363		108,078,948		11647726		39,720,420	137,362,783	25	36.75	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan					9			25		
							Faktor Pendukung T2 :													
							Faktor Penghambat T2 :													
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			89	20,000,000		28,400,000			300000		3,000,000	23,000,000	25	10.56
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 8	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan					3			25		
							Faktor Pendukung T2 :													
							Faktor Penghambat T2 :													
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																	25	31.3		
<b>Predikat Kinerja</b>																			SR	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			563,582,560		519,874,000			0		0	563,582,560	25	0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 9			Laporan Pemeliharaan			16 Laporan					4			25		
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 .	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak			0		168,285,000			0		0	0	23.33	0	

				0	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 9	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			30 Unit							7			23.33		
Faktor Pendukung T2 :																					
Faktor Penghambat T2 :																					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7	528,648,560			316,589,000			0		0	528,648,560	20 0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 9	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit							2				20	
Faktor Pendukung T2 :																					
Faktor Penghambat T2 :																					
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	34,934,000			35,000,000			0		0	34,934,000	0 0	
1.05.00.00.00. 04.0000	1	5	1	2 0 9	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit							0				0	
Faktor Pendukung T2 :																					
Faktor Penghambat T2 :																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			14.44	0	
Predikat Kinerja																		SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																		11.81	38.66		
Predikat Kinerja																		SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					0	2,303,248,547			4,076,458,343												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		5.91	21.24		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		SR	SR		

## A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (Output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahunan dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja dalam bentuk indikator kinerja dengan target tertentu untuk dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1** Penetapan Indikator Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Program)	Target
1	<b>Mengurangi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim</b>	<b>Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>4 Jenis</b>
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	310 Orang
		<b>Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<b>9 Jenis</b>

	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit
	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	12 Dokumen
	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	550 Orang
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59 Keluarga
<b>Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>5 Jenis</b>
Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen

	<b>Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>5 Jenis</b>
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen

Ke-27 target indikator kinerja tersebut diatas dicapai melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 4 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

### **B. Capaian Kinerja Tahun 2025**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Program)	Target
1	<b>Mengurangi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim</b>	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	310 Orang
		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit
		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada	12 Dokumen

	Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	
	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	550 Orang
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59 Keluarga
	<b>Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>5 Jenis</b>
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen

	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen
	<b>Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>5 Jenis</b>
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan	24 Laporan

	Penanggulangan Bencana	
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen

### C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Melihat capaian tahun 2024 BPBD Kota Samarinda optimis dapat merealisasikan seluruh kegiatan dengan baik. Untuk tahun berjalan ini yakni Anggaran APBD Kota tahun 2025 dengan usulan sebesar Rp. 14.161.054.769,- terurai dalam 2 program, 11 kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kota samarinda ***"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban"*** melalui lima pokok aspek yaitu *Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kota, Pemerintahan, Infrastruktur dan Lingkungan Kota*. pada dasarnya Kegiatan BPBD Kota Samarinda Mendukung Misi Kelima Kota Samarinda, Untuk mencapai Misi ketiga tersebut BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan bencana di Kota Samarinda baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80</b>	<b>8.714.072.772,00</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>65</b>	<b>300.000.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,00
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>54 Orang</b>	<b>7.309.072.772,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	6.478.943.272,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	780.129.500,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80 Orang</b>	<b>100.000.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	40 Paket	50.000.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	50.000.000,00
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>39 Laporan</b>	<b>748.086.720,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	10.000.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	50.000.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27 Paket	10.000.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	10.000.000,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	10.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00

<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Unit</b>	<b>10.000.000,00</b>
1	Pengadaan Mebel	1 Unit	10.000.000,00
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48 Laporan</b>	<b>100.000.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	50.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	50.000.000,00
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16 Laporan</b>	<b>605.000.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30 Unit	480.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	65.000.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	10.000.000
<b>B</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>0,69</b>	<b>5.446.981.997,00</b>
<b>I</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>270.000.000,00</b>
1	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	300 Orang	270.000.000,00
<b>II</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>3.046.981.997,00</b>
1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	250 Orang	270.000.000,00
2	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	830.000.000,00
3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25 Unit	300.000.000,00
4	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000,00
5	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	5 Kawasan	371.981.997,00
6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	11 Orang	100.000.000,00
7	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	280.000.000,00

8	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1000 Orang	200.000.000,00
9	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	295.000.000,00
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	200.000.000,00
<b>III</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>875.000.000,00</b>
1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	1 Laporan	75.000.000,00
2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3300 Orang	200.000.000,00
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	3300 Orang	350.000.000,00
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	50.000.000,00
6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Dokumen	100.000.000,00
<b>IV</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>1.255.000.000,00</b>
1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	100.000.000,00
2	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000,00
3	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.000.000,00
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	250.000.000,00
6	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	330.000.000,00

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda Sebagai berikut :

- a. Rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan diseluruh wilayah Kota Samarinda
- b. Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi komando dan pelaksanaan.
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda dalam pencapaian indikator kinerja BPBD Kota Samarinda maupun Pemerintah Kota Samarinda tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Samarinda tahun 2021 – 2026, maka Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas isu strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap isu internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

**Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana**

**Strategi :**

- 1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
3. Meningkatkan sinergitas penaggulangan bencana melalui sinkrosisasi, dan integrasi kegiatan penaggulangan bencana

**Kebijakan :**

1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penaggulangan bencana
2. Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.
3. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penganggulangan bencana

**Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana**

**Strategi :**

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar
2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penangan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan

**Kebijakan :**

1. Memperbaikan kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.
2. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaikan daerah yang tertimpa bencana
3. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran

**Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana**

**Strategi :**

1. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan penggulangan bencana
2. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha

**Kebijakan :**

1. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana

**Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana**

**Strategi :**

1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Keluarahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
3. Menguatkan kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup

**Kebijakan :**

1. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya penggulangan bencana

3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana

#### **Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana**

##### **Strategi :**

1. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat
2. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat

##### **Kebijakan :**

1. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
2. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak
3. Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 BPBD Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahaan yang menjadi kewenanganan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum khususnya urusan penanggulangan bencana yang meliputi urusan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan

rekonstruksi pada kondisi pra bencana dan pasca bencana dan indikator target secara optimal meminimalkan korban jiwa, kerugian harta bencana dan kerusakan lingkungan, pemulihan dini dan pembangunan pasca bencana yang lebih baik.

## **B. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana mencakup upaya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengendalian kepada masyarakat dan lembaga teknis dibidang pekerjaan umum khususnya penyelenggaraan penanganan bencana.
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan protab penanggulangan bencana, kaji cepat, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertanggung jawaban keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **C. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi BPBD Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana BPBD
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
  - a. Subag Umum
  - b. Subag Keuangan
  - c. Subag Perencanaan Program
3. Bidang-bidang yaitu :
  - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan dan Mitigasi;
    2. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 1. Seksi Kedaruratan dan Evakuasi
  - 2. Seksi Logistik dan Sarana Prasarana
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
  - 1. Seksi Perbaikan dan Pemulihan
  - 2. Seksi Pembangunan dan Perlindungan

#### ***Kajian Atas Indikator Kinerja***

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2021-2026, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011-2031. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase capaian program prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Samarinda Dalam Angka, Profil Daerah, Delapan Kelompok Data serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja OPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kota Samarinda dalam RPJMD.
- 2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD terhadap dokumen perencanaan OPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan OPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan OPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BPBD Kota Samarinda dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

**TABEL TC-30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA SAMARINDA**  
**KOTA SAMARINDA**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BPBD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	4	4	4	4	4	4	4	
1	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	-	-	1	0	1	0	1	0	0	
2	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	200	250	300	200	200	200	200	
B	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	3	9	9	2	3	n/a	2	

1	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	1	1	1	1	1	n/a	1	
2	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	100	100	100	100	100	35	90	
3	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	20	24	10	15	20	n/a	15	
5	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	-	-	2	2	12	2	2	1	1	

6	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	5	2	5	10	5	4	5	
7	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	-	n/a	11	20	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	1	1	2	1	1	1	1	
9	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	70	1000	500	60	70	35	55	
10	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	-	n/a	1	2	n/a	n/a	n/a	n/a	
11	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	n/a	10	59	n/a	n/a	n/a	n/a	

<b>C</b>	<b>Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>n/a</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
2	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
3	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	3800	3500	3000	4000	3800	4800	3500	
4	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	3800	3500	1500	4000	3800	4500	3700	

5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	1	1	1	1	1	50	50	
6	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
D	<b>Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	-	-	2	2	5	n/a	2	2	2	
1	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	2	3	2	3	2	2	2	
2	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	2	1	0	2	2	2	2	

3	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	3	1	1	1	1	
4	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	24	1	1	n/a	1	
6	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	1	2	2	1	1	1	1	

### 2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. BPBD Kota Samarinda pun memiliki Tantangan dan Peluang dari beberapa masukan masyarakat kota Samarinda agar selalu meningkatkan indeks ketahanan risiko bencana dalam menuju Kota yang Tangguh akan bencana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

- a. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi;
- b. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat;
- c. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan;
- d. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi;
- e. Terbatasnya mobil dan/ atau mesin penanggulangan bencana yang masih layak pakai;
- f. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban;
- g. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi;
- h. Terbatasnya jumlah WMK yang terbentuk;
- i. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh bencana akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan tahun 2013;
- j. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana;
- k. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- l. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani;
- m. Akses dalam mengikuti pelatihan TRC masih rendah.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 dan Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka presentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Adapun Hambatan, Kelemahan, Masalah serta Ancaman yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda antara lain:

1. Belum terbangunnya Sistem Informasi & Komunikasi Kebencanaan secara terpadu & terintegrasi
2. Masih terbatasnya sarana & prasarana
3. Terbatasnya jumlah personil Tanggap Darurat yang memiliki keterampilan dasar tentang penanggulangan bencana.
4. Kurangnya dana operasional untuk penanganan penanggulangan bencana yang sifatnya skala kecil namun dalam jumlah yang banyak atau sering terjadi.
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis bencana yang beragam.
6. Adanya perubahan Iklim Global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.

## 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

**TABEL TC- 31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	65	300.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	65	300.000.000,00		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000,00		
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	50.000.000,00		

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,00	
4.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	
II.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>7.309.072.772,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>7.309.072.772,00</b>	

5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	6.478.943.272,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	6.478.943.272,00	
6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	780.129.500,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	780.129.500,00	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
III.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>80 Orang</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>80 Orang</b>	<b>100.000.000,00</b>	
8.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	50.000.000,00	
9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan	10 Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai	10 Orang	50.000.000,00	

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
IV.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Samarinda</b>	<b>Laporan Penyediaan Administrasi Umum</b>	<b>19 Laporan</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Samarinda</b>	<b>Laporan Penyediaan Administrasi Umum</b>	<b>19 Laporan</b>	<b>290.000.000,00</b>	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00	
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	10.000.000,00	
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	
14.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi	22 Laporan	10.000.000,00	

								kunjungan tamu			
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	
V.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	1 Unit	10.000.000,00	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	1 Unit	10.000.000,00	
16.	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	10.000.000,00	
VI.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Laporan Penyediaan Jasa</b>	48 Laporan	100.000.000,00	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Laporan Penyediaan Jasa</b>	48 Laporan	100.000.000,00	
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	50.000.000,00	
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	50.000.000,00	

			Umum Kantor yang Disediakan					Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
VII.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	16 Laporan	605.000.000,00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Samarinda	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	16 Laporan	605.000.000,00	
19.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	480.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	480.000.000,00	
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	65.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	65.000.000,00	

21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000,00	
<b>B.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>					<b>Program Penanggulangan Bencana</b>					
VIII .	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>270.000.000,00</b>	
23.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	310 Orang	270.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	310 Orang	270.000.000,00	

			(Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				a (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
IX.	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>3.046.981.997,00</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Kota Samarinda	<b>Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>3.046.981.997,00</b>
24.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	250 Orang	270.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	250 Orang	270.000.000,00
25.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1 Dokumen	830.000.000,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	1 Dokumen	830.000.000,00

			Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
26.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	25 Unit	300.000.000,00	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	25 Unit	300.000.000,00	
27.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	2 Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	2 Dokumen	200.000.000,00	
28.	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Samarinda	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	371.981.997,00	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Samarinda	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	371.981.997,00	

29.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	100.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	100.000.000,00	
30.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	280.000.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	280.000.000,00	
31.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	200.000.000,00	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	200.000.000,00	
32.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedururan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedururan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	295.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedururan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedururan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	295.000.000,00	
33.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	200.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	200.000.000,00	

X.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	875.000.000,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	875.000.000,00	
34.	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	75.000.000,00	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	75.000.000,00	
35.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	100.000.000,00	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	100.000.000,00	
36.	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang	200.000.000,00	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang	200.000.000,00	

37.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	350.000.000,00	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	350.000.000,00	
38.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	50.000.000,00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	50.000.000,00	
39.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000,00	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000,00	
XI.	Penataan Sistem Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Penataan Sistem Dasar	5 Jenis	1.255.000.000,00	Penataan Sistem Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Penataan Sistem Dasar	5 Jenis	1.255.000.000,00	

	Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana			Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana		
40.	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00
41.	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00
42.	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	225.000.000,00	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	225.000.000,00
43.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kota Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kota Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00
44.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan	1 Laporan	250.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan	1 Laporan	250.000.000,00

			Penanggulangan Bencana			Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana			
45.	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	2 Dokumen	330.000.000,00	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	2 Dokumen	330.000.000,00	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam upaya mensukseskan program dan kegiatan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program yang diarahkan pada peningkatan kinerja dan sinergitas pemerintahan, dalam upaya meningkatkan hal-hal tersebut di atas, BPBD Kota Samarinda akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Beberapa Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sudah ada masuk tetapi tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda melainkan masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda sehingga usulan tersebut kami pindahkan kepada OPD yang bersangkutan.

**TABEL TC-32**

### Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kota Samarinda Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Tidak Ada Usulan				
2	Tidak Ada Usulan				
3	Tidak Ada Usulan				
4	Tidak Ada Usulan				

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6, meliputi :

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemanfaatan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan
- g. Pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Sementara wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7, adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
  - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,
  - b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
  - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah
  - d. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain
  - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
  - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, dan
  - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala nasional.
- 2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi :
  - a. Jumlah korban
  - b. Kerugian harta benda
  - c. Kerusakan prasarana dan sarana
  - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan
  - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Presiden.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD**

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota

Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BPBD Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana
4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPBD Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan ingin dicapai adalah :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala.
- b. Peningkatan kinerja organisasi dalam koridor Good Government.
- c. Peningkatan kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas, membangun system pencegahan dan kesiapsiagaan.
- d. Pelaksanaan penanganan darurat dan logistik secara terencana, terpadu, terkoordinasi, cepat dan tepat.
- e. Pelaksanaan system kaji cepat, dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpadu, terkendali, transparan dan akuntabel dengan dukungan peralatan dan alat memadai

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala.
- b. Terlaksananya tata laksana organisasi yang efisien dengan pemberdayaan staf yang optimal.
- c. Terlaksananya bimbingan teknis kepada aparatur, swasta (PMK swasta) dan kelompok masyarakat (tenaga sukarelawan, balakarcana, balakarkotadsj) untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, pemahaman terhadap system pengurangan resiko bencana (PRB) dan mitigasi adaptasi perubahan iklim (MAPI) guna membangun ketangguhan daerah.
- d. Terlaksananya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana.
- e. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik disbanding sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarus utamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah "***TERWUJUDNYA LEMBAGA DAN MASYARAKAT YANG TANGGUH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA***" maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kota Samarinda tahun 2025 terdiri dari:

Adapun rencana program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

**TABEL TC-33****Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Tahun + 1	
					Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga			
					Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Rp. 4.842.613.797,00	Rp. 604.368.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.446.981.997,00	Rp. 6.390.000.000,00	
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rp. 270.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 270.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 270.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 270.000.000,00	Rp. 280.000.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Rp. 2.619.781.997,00	Rp. 427.200.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.046.981.997,00	Rp. 4.210.000.000,00

1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 120.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 140.300.000,00	Rp. 159.700.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00	Rp. 550.000.000,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00	Rp. 450.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun N						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 219.981.997,00	Rp. 152.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 371.981.997,00	Rp. 450.000.000,00	

1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 280.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 280.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 284.500.000,00	Rp. 10.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 295.000.000,00	Rp. 600.000.000,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 805.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 830.000.000,00	Rp. 630.000.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 270.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 270.000.000,00	Rp. 280.000.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Rp. 726.260.800,00	Rp. 148.739.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 875.000.000,00	Rp. 875.000.000,00
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 71.250.000,00	Rp. 3.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00

1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 77.649.800,00	Rp. 22.350.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 120.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 323.600.000,00	Rp. 26.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
								Tahun N					
Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)						
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 94.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 39.761.000,00	Rp. 10.239.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			Rp. 1.226.571.000,00	Rp. 28.429.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.255.000.000,00	Rp. 1.025.000.000,00

1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 225.000.000,00	Rp. 225.000.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 221.571.000,00	Rp. 28.429.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 330.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 330.000.000,00	Rp. 350.000.000,00
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 8.647.522.772,00	Rp. 66.550.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.714.072.772,00	Rp. 8.021.288.848,00

1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 300.000.000,00	Rp. 159.368.181,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 39.368.181,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 7.302.522.772,00	Rp. 6.550.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.309.072.772,00	Rp. 6.219.169.000,00

1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 6.478.943.272,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.478.943.272,00	Rp. 5.412.888.000,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 780.129.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 780.129.500,00	Rp. 756.281.000,00
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 43.450.000,00	Rp. 6.550.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 130.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 85.000.000,00
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 45.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 240.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 290.000.000,00	Rp. 530.251.667,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 15.000.000,00

1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 25.251.667,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun N						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 0,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	

1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 150.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 605.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 605.000.000,00	Rp. 722.500.000,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 480.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 480.000.000,00	Rp. 500.000.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 112.500.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi						Tahun + 1
								Tahun N					
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)									
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 40.000.000,00
Jumlah								Rp. 13.490.136.569,00	Rp. 670.918.200,00			Rp. 14.161.054.769,00	Rp. 14.411.288.848,00

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasio nal	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda				14.161.054.769,00					14.411.288.848,00				
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.161.054.769,00					14.411.288.848,00				
	1	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.161.054.769,00					14.411.288.848,00				
1	1	0	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 NILAI	78	75	80 NILAI	8.714.072.772,00				75 NILAI	8.021.288.848,00		
1	0	0	2.	5	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	67Nilai	62	65	65 Nilai	300.000.000,00		-	6. Peningk atan kualitas lingkung an hidup secara berkelanjutan 5. Penguatan Pelayan an yang Prima	-	65 Nilai	159.368.181,00	
1	0	0	2.	5	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	5 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	01	06									
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	1 Laporan	39.368.181,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	01	07									
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

															5. Penguatan Pelayanan yang Prima							
1	0	0	2.	00	5	1	01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
									Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	0	0	2 Berita Acara	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan jutaan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-	0	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	02	5	1	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan	7Laporan	7Laporan	7Laporan	7.309.072.772,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan jutaan 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	7Laporan	6.219.169.00,00	
1	0	0	2.	00	5	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6.478.943,272,00	Kota Samarinda, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	6. Peningkatan kualitas	-	36 Orang/bulan	5.412.888,00,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

									Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima				DAERAH KOTA SAMARINDA					
1	0	0	2.	00	00	5	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	780.129.50 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima		26 Dokumen	756.281.00 0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	00	5	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
									Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima		5 Laporan	50.000.000, 00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

1	0	0	2.	05		Administrasi Kepegawai dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	80Orang	80 Orang	85 Orang	85 Orang	100.000.000,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	80Orang	130.000.000,00	
1	0	0	2.	05	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	80 Paket	85 Paket	85 Paket	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	80 Paket	85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	

1	0	0	2.															
5	1	06																
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	19Laporan	19Laporan	19Laporan	19Laporan	290.000.000,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	19Laporan	530.251.667,00				
1	0	0	2.															
5	1	06	00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	5 Paket	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.															
5	1	06	00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-	5 Paket	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	22 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA					
1	0	0	2.	00	5	1	06	2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	12 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA					
1	0	0	2.	07	5	1	07	2.	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00		-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Peningkatan Kualitas	-	1Unit	10.000.000,00	

														Lingkungan Hidup				
1	0	0	2.	00														
5	1	07	05	Pengadaan Mebel														
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
1	0	0	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100.000.000,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguatkan Pelayanan yang Prima	136 Laporan	250.000.000,00	
5	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara	-	36 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	

					yang Disediakan					Kel/Des a			berkelan jutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima						
1	0	0	2.	00		5	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	50.000.000, 00	Kota Samari nda, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningk atan kualitas lingkung an hidup secara berkelan jutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	12 Lapora n	100.000.00 0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
1	0	0	2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	16Lapor an	16 Lapora n	16 Lapora n	16 Lapora n	605.000.00 0,00			-	6. Peningk atan kualitas lingkung an hidup secara berkelan jutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	16Lapor an	722.500.00 0,00	
1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5	1	09	01									
					Jumlah Kendaraan Perorangan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	480.000.00 0,00	Kota Samari nda,	PENDAP ATAN ASLI	-	6. Peningk atan	-	20 Unit	500.000.00 0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN	

					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima				BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	1	09	02									
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	65.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima	-	10 Unit	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	1	09	09									
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayan	-	1 Unit	112.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

1	0	0	2.	00	5	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	0	0	26 Unit	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	30 Unit	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
2	1	0	0	5	3				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi	48,15Persen	53,67Persen	51,70Persen	47,96Persen	37,04 Persen	5.446.981,997,00					48,15Persen	6.390.000.00,00	
	1	0	0	2.	01	5	3	01	Pelayanan Informasi Rawan	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi	4Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	270.000,00			-	6. Peningkatan	-	4Jenis	280.000,00	

					Bencana Kabupaten/Kota	Rawan Bencana												
1 5	0 3	0 01	2. 07	00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	320 Orang	310 Orang	300 Orang	310 Orang	270.000.00 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-		280.000.00 0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1 5	0 3	0 02	2. 02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	3.046.981.9 97,00		-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-	9Jenis	4.210.000.0 00,00	

1	0	0	2.	00	5	3	2.	02	00	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguanan Pelayanan yang Prima	-	- Kegiatan	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	5	3	2.	02	00	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguanan Pelayanan yang Prima	-	10 Unit	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	5	3	2.	02	00	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi	600 Orang	1000 Orang	500 Orang	550 Orang	200.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	6. Peningkatan	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN





					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	295.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1 0 0 5	0 3	2. 02	00	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	830.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayan an yang Prima	-		630.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1 0 0 5	0 3	2. 02	00	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	270.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5.	-		280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA



					Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					Semua Kel/Desa			secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima				KOTA SAMARINDA	
1	0	0	2.	00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
5	3	03	03		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	200.000.00 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima	-	3000 Orang	200.000.00 0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
5	3	03	09		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	350.000.00 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguan Pelayanan yang Prima	-	1500 Orang	350.000.00 0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit													
5	3	03	10															

					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayanan yang Prima	-	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	3	03	12									
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an Pelayanan yang Prima	-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
1	0	0	2.	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1.255.000.00,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguat an	5Jenis	1.025.000.00,00	

															Pelayan an yang Prima							
1	0	0	2.	00	5	3	04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
									Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaran Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.00 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	2 Dokumen	100.000.00 0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	5	3	04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
									Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	225.000.00 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	3 Dokumen	225.000.00 0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	5	3	04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan													
									Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.00 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-	1 Dokumen	100.000.00 0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																				KOTA SAMARINDA		
1	0	0	2.	00	5	3	04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana													
									Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	24 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
1	0	0	2.	00	5	3	04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
									Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	330.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	- Kegiatan	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

	1	0	0	2.	00	00	5	3	04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota												
											Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	<b>J U M L A H</b>										14.161.054.769,00					14.411.288.848,00							

## BAB V

## P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 yang memuat tentang rencana pelaksanaan dan aktualisasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan rencana kinerja dari semua program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda selama satu tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada dasar pelaksanaannya mengacu pada visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025 ini adalah dengan memberikan prioritas kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana. Prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 yang tercakup dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah :

- 1) Penanganan Pra Bencana (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
- 2) Penanganan Tanggap Darurat (Kedaruratan dan Logistik)
- 3) Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.

Samarinda, 22 Juli 2024

Kepala Pelaksana,

**SUWARSO, A.Ks., M.Si**

NIP. 196909201991121001



  @BPBDSamarinda

*magnificent*  
**SAMARINDA**

0811-5537-007 